

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Pasal 1 nomor 12 menyatakan bahwa kinerja pemerintah daerah didefinisikan sebagai capaian pemerintah setempat yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Salah satu bentuk upaya pemerintah adalah dengan menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Kepmendagri) tentang penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 mewajibkan tiap Kepala Daerah untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat. LPPD yang telah disampaikan akan dievaluasi oleh Pemerintah Pusat. Salah satu Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah berupa Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Penyelenggaraan pemerintah dilihat dari data proporsi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten dan kota yang berstatus rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa informasi akuntansi mempunyai berbagai manfaat. Secara khusus, tentang karakteristik keuangan pemerintah daerah menyatakan bahwa karakteristik keuangan pemerintah daerah berupa kemandirian keuangan, belanja operasional, penggunaan utang, dan sumber daya keuangan yang dimiliki pemerintah daerah mempunyai pengaruh terhadap kesulitan keuangan (Trussel

dan Patrick 2009) dan juga mempunyai pengaruh terhadap kinerja (Mustikarini dan Fitriasaki 2012). Meskipun demikian, hasil dari penelitian-penelitian tersebut belum sepenuhnya konsisten dengan teori yang ada. Misalnya, hasil penelitian Mustikarini dan Fitriasaki (2012) menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja. Hasil tersebut tidak konsisten dengan teori yang menyatakan pengaruh positif (pemerintah daerah yang mengeluarkan belanja daerah relatif besar memperoleh kinerja yang relatif tinggi). Hasil dari trussel dan patrick (2009) juga tidak konsisten yang ditunjukkan bahwa pemerintah daerah yang mengeluarkan belanja operasional yang relatif rendah cenderung mengalami penurunan layanan. Tetapi penelitian tersebut menunjukkan yang sebaliknya.

Informasi dalam laporan keuangan dan opini audit dipilih untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam penelitian ini mempunyai beberapa alasan. Pertama, pelaporan keuangan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 (UU 17/2003) tentang Keuangan Negara. Didalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Gubernur atau Bupati atau Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan. Kedua, pelaporan keuangan berperan antara lain untuk membantu para pengguna guna mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah untuk kepentingan masyarakat (PP 71/2010 Lampiran II Paragraf 22 (b)). Pelaporan keuangan bertujuan untuk

menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik (PP 71/2010 Lampiran II Paragraf 23 (b)).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Purnama Siddi (2016) dengan perbedaan dalam penelitian ini menambahkan variabel kelemahan sistem pengendalian intern Hendrianto, Popi Fauziah, Ethika (2013). Didalam akuntansi, pengendalian intern yang berlaku dalam organisasi/instansi merupakan faktor yang menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. Kelemahan sistem pengendalian intern pada umumnya terjadi karena para pejabat/pelaksana yang bertanggungjawab kurang cermat dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan tugas. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data selama periode 2015– 2017.

Secara spesifik, penelitian tersebut menguji apakah karakteristik keuangan yang terkandung laporan keuangan dan opini audit dalam satu tahun dapat berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dua tahun berikutnya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah?

2. Bagaimanakah belanja operasional berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah?
3. Bagaimanakah penggunaan utang berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah?
4. Bagaimanakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah?
5. Bagaimanakah opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah?
6. Bagaimanakah kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan bukti empiris bahwa pendapatan asli daerah mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Untuk memberikan bukti empiris bahwa belanja operasional mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Untuk memberikan bukti empiris bahwa penggunaan utang mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Untuk memberikan bukti empiris bahwa ukuran pemerintah daerah mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Untuk memberikan bukti empiris bahwa opini audit mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

6. Untuk memberikan bukti empiris bahwa kelemahan sistem pengendalian intern mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang dilaksanakan dalam penyusunan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

1. Bagi akademisi, sebagai referensi dan uji kemampuan dalam menerapkan teori yang diperoleh di perkuliahan terkait dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Bagi penulis, sebagai wawasan dan pengalaman dalam bidang akuntansi sektor publik yaitu pengaruh karakteristik keuangan dan opini audit terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bagi pemerintah, memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah daerah, sebagai sarana untuk memperkenalkan kepada masyarakat khususnya dilingkungan instansi pemerintahan.
4. Bagi pegawai instansi, memberikan informasi dan dapat digunakan sebagai umpan balik bagi kinerja sehingga dapat meningkatkan kinerja instansi.